



**DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR KOREA UTARA
TERHADAP HUBUNGAN BILATERALNYA DENGAN TIONGKOK
TAHUN 2013 – 2015**

Nur Afyah Isnaeni
Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

China and North Korea have had good bilateral relations, as the result of their geographical proximity and their similar ideology (communist). China's status as a member of the UN Security Council and its stable economy, causes North Korea to depend on diplomatic and economic support from China. North Korea needs diplomatic support from China because its nuclear proliferation since North Korea decided to withdraw from the *non-proliferation treaty*. As North Korea's closest ally, China provided diplomatic support by not fully supporting UN sanctions for North Korea's first and second nuclear tests. However, China did not provide diplomatic support when North Korea launched the third nuclear test, on the contrary, China supported UN Sanction towards North Korea. This research aims to analyze the causes of China's policy changes toward North Korea nuclear test. The theoretical framework in this research is the concept of neo-classical realism. The type of this research is descriptive, using qualitative data analysis techniques from literatures review. This research shows that there are two causes of China's policy changes toward North Korea nuclear test, which are: the international structure (pressure from the United States) and China's domestic conditions (leader, power, and society).

Keywords: *nuclear proliferation, policy changes, international structure, domestic condition, North Korea, China*

Pendahuluan

Korea Utara merupakan negara bukan pemilik senjata nuklir atau *non-nuclear weapon state* yang melanggar isi perjanjian *Non-Proliferation Treaty*. *Non-Proliferation Treaty (NPT)* melarang negara pemilik senjata nuklir atau *nuclear-weapon state* menambah jumlah nuklir dan melakukan transfer senjata nuklir ke negara bukan pemilik senjata nuklir. Negara bukan pemilik senjata nuklir dilarang memproduksi dan menerima bantuan pembuatan nuklir atau alat peledak lainnya (United Nations, 2005). Korea Utara yang berstatus sebagai negara bukan pemilik senjata nuklir melanggar isi perjanjian NPT dengan melakukan proliferasi nuklir dan aktif melakukan uji coba senjata nuklirnya.

Uji coba nuklir Korea Utara yang pertama dilakukan pada 9 Oktober 2006. *The United States Geological Survey* mendeteksi terjadinya getaran 4,2 magnitude di Semenanjung Korea, tepatnya di bawah tanah desa P'unggye, Kilju County, Provinsi North Hamgyong, Korea Utara. Tiga tahun paska uji coba nuklir pertama Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir tepatnya pada 25 Mei 2009. Uji coba nuklir Korea Utara yang kedua dilakukan di lokasi yang sama dengan uji coba nuklir Korea Utara yang pertama yaitu di bawah tanah desa P'unggye, Kilju County, Provinsi North Hamgyong.

Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir pada 12 Februari 2013. Uji coba nuklir Korea Utara yang ketiga mengakibatkan puing-puing sisa nuklir jatuh ke daratan Korea Utara. Menurut laporan dari *Arms Control Association* tahun 2016 ledakan uji coba nuklir yang ketiga lebih kuat dari dua uji coba nuklir sebelumnya. Aktivitas seismik yang dihasilkan mencapai getaran 4,9 magnitude. Aktivitas seismik ini terjadi di dekat lokasi uji coba nuklir tahun 2006 dan 2009 yang menimbulkan ledakan. Estimasi jangkauan nuklir Korea Utara mencapai 6000 km dengan jenis rudal balistik Taepodong.

Proliferasi nuklir Korea Utara yang berujung pada uji coba nuklir Korea Utara tahun 2006, 2009, dan 2013 mengancam kemanan nasional terutama regional Asia Timur. Negara-negara diregional Asia Timur menjadi negara yang paling terancam dari dampak uji coba nuklir Korea Utara. Sebagai bentuk pertahanan terhadap ancaman nuklir Korea Utara negara di regional Asia Timur melakukan upaya untuk menghentikan proliferasi nuklir Korea Utara, salah satunya melalui Tiongkok. Tiongkok memiliki sejarah kedekatan dengan Korea Utara berawal dari bantuan Tiongkok pada perang Korea tahun 1950. Pengorbanan Tiongkok pada perang Korea tahun 1950 membuat kedua negara dijuluki *Blood Alliance* (Beina dan Bajoria, 2006 dalam Council on Foreign Relations).

Sebagai sekutu terdekat Korea Utara, Tiongkok dinilai memiliki peran penting dalam menghentikan proliferasi nuklir Korea Utara dan menjamin keamanan regional Asia Timur. Akan tetapi kedekatan kedua negara dapat menjadi ancaman apabila Tiongkok membiarkan Korea Utara melakukan proliferasi nuklir dan melindungi Korea Utara dari sanksi PBB melalui hak vetonya.

Berdasarkan laporan dari *Global Trade Atlas*, Tiongkok menunjukkan dukungan diplomatisnya terhadap Korea Utara dengan tidak mendukung sanksi pada Resolusi 1718 akibat uji coba nuklir Korea Utara yang pertama tahun 2006. Resolusi 1718 berisi mengenai larangan kegiatan ekspor impor kendaraan namun paska dijatuhkannya Resolusi 1718 Tiongkok tetap melakukan ekspor kendaraan ke Korea Utara. Dukungan diplomatis juga diberikan Tiongkok pada Resolusi 1874 akibat uji coba nuklir Korea Utara yang kedua. Resolusi 1874 melarang ekspor senjata ke Korea Utara jenis apapun termasuk senjata kecil namun Tiongkok tetap melakukan ekspor senjata ke Korea Utara.

Tiongkok menunjukkan sikap yang berbeda pada Resolusi 2094 akibat uji coba nuklir Korea Utara yang ketiga tahun 2013. Tiongkok tidak lagi menunjukkan dukungan diplomatisnya bahkan memberikan sanksi tambahan berupa embargo pasokan energi ke Korea Utara. Berdasarkan laporan dari BBC (*British Broadcasting Corporation News*) 8 Januari 2016, Tiongkok melalui Kementerian perdagangannya menyatakan pembatasan perdagangan dengan Korea Utara, lewat pelarangan impor emas dan batu bara serta ekspor bahan bakar jet, sesuai dengan sanksi Dewan Keamanan PBB.

Untuk itu permasalahan penelitian ini adalah bagaimana dampak proliferasi nuklir Korea Utara terhadap hubungan bilateralnya dengan Tiongkok dan mengapa Tiongkok mengubah kebijakan luar negerinya terhadap proliferasi nuklir Korea Utara tahun 2013 – 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak proliferasi nuklir Korea Utara terhadap hubungan bilateralnya dengan Tiongkok. Lalu mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan Tiongkok terhadap proliferasi nuklir Korea Utara dan menganalisis mengapa kebijakan Tiongkok tersebut berubah.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori *neo-classical realism*. Stevan Lobell (2009 dalam Robert Jackson and Georg Sorensen 2013 : 152) berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dilaksanakan dibawah pengaruh dan batasan keadaan internasional yang didefinisikan dengan adanya kebijakan kekuatan asing yang menjanjikan maupun mengancam. Kebijakan kekuatan asing diterjemahkan oleh pemimpin negara sebagai ancaman atau bukan ancaman. Pemimpin

negara memutuskan kebijakan luar negeri sebagai respon dari kebijakan kekuatan asing dengan mempertimbangkan kekuatan negara dan kondisi masyarakat.

Arti penting kondisi domestik yang meliputi persepsi pemimpin, kekuatan negara, dan kondisi masyarakat adalah sebagai filter mengapa tindakan negara secara eksternal berbeda-beda. *Neo-classical realism* merupakan teori kebijakan luar negeri yang merupakan kombinasi antara *classical realism* dan *neo-realism*. Menurut Collin Elman (dalam Martin Griffiths 2007 : 12) *classical realism* berasumsi bahwa perilaku manusia konfliktual yang menyebabkan negarawan bertindak secara agresif untuk mengejar *power*. Akibatnya kebijakan luar negerinya menjadi ekspansionis untuk melayani diri sendiri. Sedangkan asumsi *neo-realism* menurut Kenneth Waltz (1979 dalam Robert Jackson and Georg Sorensen 2013 : 136) keadaan internasional yang konfliktual dipengaruhi oleh sesuatu yang lebih dari sekedar perilaku individu yang agresif. Struktur internasional yang anarki (tidak ada pemerintahan dunia) membuat negara-negara harus bertahan hidup dengan memaksimalkan kekuatan. Kebijakan luar negeri suatu negara didasarkan pada kepentingan nasional, negara bertindak dengan mempertimbangkan *cost* dan *benefit*.

Pembahasan

Hubungan Bilateral Tiongkok - Korea Utara

Tiongkok dan Korea Utara memiliki hubungan bilateral yang baik dilatarbelakangi kedekatan geografis dan kesamaan ideologi komunis. Kedekatan geografis Tiongkok dan Korea Utara dikarenakan keduanya merupakan negara yang berada di regional Asia Timur dan berbatasan langsung. Sedangkan kesamaan ideologi diperoleh dari ideologi kedua pemimpin negara yang sama-sama menganut paham komunis. Kedekatan geografis dan kesamaan ideologi komunis pula yang membawa Tiongkok terlibat dalam perang Korea 1950 dan menjadi sejarah awal aliansi kedua negara yang dijuluki "*Blood Alliance*" (Beina dan Bajoria, 2006 dalam Council on Foreign Relations).

Persekutuan antara Tiongkok dan Korea Utara semakin kuat manakala pada tahun 1961 kedua negara menandatangani *Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance*. Perjanjian tersebut mengatur tentang bantuan yang saling menguntungkan antar kedua pihak dan keharusan untuk berkonsultasi mengenai isu internasional yang berpengaruh terhadap kedua negara. *Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance* berlaku sampai dengan kedua negara menyetujui adanya perubahan atau keputusan untuk penghentiannya.

Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance bukan merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan persekutuan Tiongkok dan Korea Utara semakin kuat. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menyebabkan Korea Utara bergantung pada Tiongkok untuk memulihkan kembali perekonomiannya yang terpuruk akibat perang Korea. Ketergantungan Korea Utara terhadap Tiongkok terutama dalam sektor penting seperti energi, pangan dan pembangunan. *Supply* energi, pangan dan pembangunan bagi Korea Utara bukan hal yang sulit dilakukan oleh Tiongkok terutama paska diterapkannya kebijakan *open door policy* oleh Deng Xiaoping yang membuat perekonomian Tiongkok meningkat pesat.

Korea Utara tidak hanya bergantung pada dukungan ekonomi Tiongkok, namun juga dukungan diplomatis. Dukungan diplomatis Tiongkok penting mengingat status Tiongkok sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Korea Utara membutuhkan dukungan diplomatis Tiongkok terutama terkait proliferasi nuklir yang dilakukan. Korea Utara mulai aktif melakukan proliferasi nuklir paska mengundurkan diri dari *Non-Proliferation Treaty*. Puncaknya pada tahun 2006 Korea Utara melakukan uji coba nuklir

yang pertama dilanjutkan dengan uji coba nuklir kedua tahun 2009 dan uji coba nuklir yang ketiga tahun 2013.

Sebagai sekutu terdekat Korea Utara, Tiongkok memberikan dukungan diplomatiknya dengan tidak sepenuhnya menerapkan sanksi yang dijatuhkan PBB terhadap Korea Utara. Sanksi PBB terhadap Korea Utara akibat uji coba nuklirnya tertuang dalam Resolusi 1718 tahun 2006, Resolusi 1874 tahun 2009, dan Resolusi 2094 tahun 2013. Berdasarkan laporan dari *Global Trade Atlas* tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 membuktikan dukungan diplomatik Tiongkok dengan tidak mendukung sanksi Resolusi Dewan Keamanan PBB. Tiongkok tetap mengekspor kendaraan ke Korea Utara pada tahun 2007 yang berarti bertentangan dengan Resolusi 1718. Resolusi 1718 tahun 2006 mengatur mengenai larangan ekspor – impor kendaraan yang dapat mendorong terjadinya provokasi (pesawat tempur, kapan perang, kendaraan lapis baja).

Tiongkok tetap mengekspor senjata ke Korea Utara pada tahun 2010 dan bertentangan dengan Resolusi 1874 tahun 2009. Resolusi 1874 tahun 2009 mengatur mengenai embargo semua jenis senjata termasuk senjata kecil ke Korea Utara. Menurut laporan dari *Arms Control Association* tahun 2013, melalui perwakilan diplomatiknya, Tiongkok menekankan kepada PBB untuk menggunakan cara-cara diplomatik daripada sanksi yang bersifat memaksa. Tiongkok juga menegaskan bahwa sanksi dari resolusi PBB tidak boleh berdampak negatif pada pembangunan ekonomi di Korea Utara.

Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok terhadap Nuklir Korea Utara

Dukungan diplomatik Tiongkok terhadap Korea Utara pada Resolusi 1718 dan Resolusi 1874 yang dijatuhkan PBB akibat uji coba nuklir yang pertama tahun 2006 dan kedua tahun 2009, tidak lagi dilakukan Tiongkok pada uji coba nuklir yang ketiga tahun 2013. Berdasarkan laporan dari *Global Trade Atlas* tahun 2013 dan 2014 Tiongkok terbukti sepenuhnya mendukung Resolusi 2094 yang dijatuhkan PBB kepada Korea Utara akibat uji coba nuklir ketiga tahun 2013. Dukungan Tiongkok terhadap Resolusi 2094 tahun 2013 yaitu: (1) Tiongkok memanggil duta besar Korea Utara dan menyerukan pembicaraan mengenai denuklirisasi; (2) Tiongkok menerapkan sanksi Resolusi 2094 dengan tidak mengekspor barang mewah seperti perhiasan (emas dan permata), Tiongkok hanya mengekspor perak, perhiasan imitasi dan lukisan yang jumlahnya tidak lebih dari US\$ 322 ribu; (3) Tiongkok melakukan embargo minyak mentah terhadap Korea Utara tahun 2014.

Pengaruh Struktur Internasional terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok mengenai Uji Coba Nuklir Korea Utara

Perubahan sikap Tiongkok terkait uji coba nuklir Korea Utara yang signifikan disebabkan oleh kondisi dunia internasional dan adanya perubahan dalam kondisi domestik Tiongkok. Kondisi dunia internasional yang mendesak Tiongkok dilakukan oleh negara-negara superpower seperti Amerika Serikat yang menyerukan Tiongkok segera mengambil langkah tegas terhadap sekutunya Korea Utara. Tiongkok dianggap memiliki pengaruh yang unik terhadap rezim Korea Utara. Desakan Amerika Serikat disampaikan langsung oleh pemimpinnya dalam forum internasional maupun pertemuan pribadi kedua pemimpin negara. Berdasarkan laporan dari *nuclear security summit*, Barack Obama secara konsisten menyerukan kepada Tiongkok untuk mengambil langkah tegas terhadap Korea Utara pada pertemuan *nuclear security summit* tahun 2012 (di Korea Selatan), tahun 2014 (di Belanda), dan tahun 2016 (di Washington).

Seruan Amerika Serikat terhadap Tiongkok untuk melakukan denuklirisasi Korea Utara terwujud dengan di bangunnya *Terminal High-Altitude Area Defense* (THAAD) di Korea Selatan. Menurut Choe Sang-Hun dalam *New York Times*, Korea Selatan dan

Amerika Serikat telah memutuskan menerapkan THAAD pada 7 Juli 2016. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ryu Jae-Sung Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan didampingi Letnan Gen Thomas Vandal Komandan *Eighth United States Army* (EUSA) untuk Korea Selatan dalam konferensi pers di Seoul ibukota Korea Selatan. Menurut Ryu kedua negara sepakat menerapkan THAAD untuk melindungi Korea Selatan dan militer Amerika Serikat di Korea Selatan dari ancaman rudal balistik Korea Utara yang lebih kuat.

Selain menempatkan THAAD di Korea Selatan, Amerika Serikat juga meningkatkan kerjasama keamanan dengan Jepang sebagai bentuk seruan terhadap Tiongkok. Menurut Craig Whitlock dan Anne Gearan dalam *Washington Post* 3 Oktober 2013. Jepang memperbarui perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat berupa; (1) Amerika Serikat akan mengerahkan pesawat – pesawat pengintai jarak jauh tanpa awak “*Global Hawk*” untuk membantu memantau kegiatan maritim di Pasifik; (2) Amerika Serikat akan menempatkan sistem radar X-band di pangkalan udara Kyogamisaki di pantai barat Jepang untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara; (3) Amerika Serikat akan merelokasi 5000 tentaranya dari Okinawa ke daerah-daerah lain di Pasifik.

Seruan Amerika Serikat dan negara sekutunya terhadap Tiongkok untuk mengambil langkah tegas kepada Korea Utara menyebabkan adanya *security dilemma*. *Security dilemma* tersebut dalam bentuk dibangunnya THAAD di Korea Selatan dan pembaruan perjanjian keamanan Jepang dengan Amerika Serikat.

Pengaruh Keadaan Domestik Tiongkok terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok mengenai Uji Coba Nuklir Korea Utara

Perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok disebabkan adanya kondisi internasional yang mengancam keamanan nasional dan kelangsungan hidup Tiongkok. Sedangkan keamanan nasional dan kelangsungan hidup adalah faktor tertinggi yang harus dijamin negara akibat tidak adanya pemerintahan dunia yang dapat menjamin keamanan nasional negara. Apabila menggunakan teori *neo-realism* perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok cukup dipengaruhi oleh kondisi dunia internasional yang anarki yaitu dengan adanya ancaman dari Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang dalam bentuk THAAD dan pembaruan kebijakan keamanan. Namun menggunakan *neo-classical realism* tidak hanya struktur internasional yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok melainkan juga kondisi domestik. Keadaan domestik tersebut berupa: (1) Persepsi pemimpin; (2) Kekuatan negara; (3) Kondisi Masyarakat

Persepsi Pemimpin Tiongkok (Xi Jinping)

Pemimpin Tiongkok saat ini yaitu Xi Jinping menilai bahwa seruan Amerika Serikat merupakan ancaman bagi keamanan nasional Tiongkok. Sehingga Tiongkok perlu memutuskan kebijakan yang baru terkait nuklir Korea Utara. Kebijakan yang baru diputuskan Xi Jinping dengan mempertimbangkan kekuatan negara dan kondisi masyarakat Tiongkok.

Persepsi Xi Jinping yang menganggap seruan Amerika Serikat merupakan ancaman bagi keamanan nasional Tiongkok disebabkan oleh: (1) Politik Luar Negeri Xi Jinping “*Peacefull Rise*”. *Peacefull Rise* bertujuan untuk mempertahankan lingkungan eksternal yang stabil yang penting bagi pembangunan ekonomi Tiongkok (Zhang 2015 : 2). Uji coba nuklir Korea Utara telah menciptakan keadaan yang tidak stabil di regional Asia Timur; (2) Xi Jinping Menganut Asas *Zuo Hao Zhoubian Waijiao Gongzuo* yang berarti menjalin hubungan baik dengan negara tetangga. Asas tersebut disampaikan pada saat konferensi tingkat tinggi (KTT) antar pejabat Tiongkok pada 24 – 25 Oktober 2013. Uji coba nuklir Korea Utara menghambat tercapainya asas *Zuo Hao Zhoubian Waijiao Gongzuo*. Hubungan politik Tiongkok dengan negara tetangga yaitu Jepang dan Korea Selatan tidak

dalam kondisi baik mengingat adanya konflik sejarah dan perebutan wilayah. Dukungan diplomatik Tiongkok terhadap Korea Utara akan menambah daftar panjang konflik antara Tiongkok dengan Jepang dan Korea Selatan yang berarti menghambat tercapainya *zuo hao zhoubian waijiao gongzuo*; (3) Xi Jinping lebih berani menonjolkan peningkatan status internasional Tiongkok dengan kebijakan luar negeri yang aktif dan tegas (Szcudlik, 2015:3).

Persepsi Xi Jinping yang menganggap tekanan Amerika Serikat merupakan ancaman, menyebabkan Tiongkok memutuskan kebijakan yang baru terkait nuklir Korea Utara. Keputusan Xi Jinping tersebut dengan mempertimbangkan kekuatan ekonomi Tiongkok dan kondisi masyarakat Tiongkok.

Kekuatan Ekonomi Tiongkok

Menurut laporan dari *World Economic Forum* tahun 2015, Tiongkok menduduki peringkat kedua ekonomi terbesar didunia. Tiongkok bergantung pada perekonomiannya yang maju sebagai instrumen diplomasi utamanya. Kondisi ini terjadi mengingat Tiongkok kekurangan kekuatan strategis yang dapat dipercaya negara lain untuk menjamin keamanan regional Asia Timur. Kemajuan perekonomian Tiongkok bergantung pada negara-negara partner dagang terbesar Tiongkok. Berdasarkan laporan dari *Global Trade Atlas*, partner dagang terbesar Tiongkok adalah Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Ketiga negara yang menjadi partner dagang terbesar Tiongkok merupakan negara target nuklir Korea Utara dan yang paling aktif menyerukan Tiongkok menghentikan proliferasi nuklir sekutunya.

Kondisi Masyarakat Tiongkok

Masyarakat Tiongkok terutama golongan militer dan golongan intelektual ilmuwan menganggap Korea Utara bukan lagi sekutu mereka. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya ancaman yang diterima Tiongkok akibat uji coba nuklir Korea Utara. Menurut Wang Hongguang seorang pensiunan Letnan Jenderal Tentara Tiongkok, nuklir Korea Utara sangat beresiko karena adanya kemungkinan nuklir menabrak pesawat yang akan mendarat karena uji coba nuklir dilakukan di rute penerbangan Tokyo – Shenyang. Selain itu, uji coba nuklir juga dilakukan di rute latihan militer Tiongkok. Wang Hongguang secara terbuka menganjurkan pemerintah Tiongkok untuk menghentikan ketidakstabilan di regional Asia Timur yang disebabkan oleh Korea Utara. Wawancara *New York Times* dengan intelektual dari Tiongkok Profesor Yan Xuetong, Direktur Institut Studi Internasional bidang politik Universitas Tsinghua mengatakan bahwa Korea Utara bukan lagi sekutu Tiongkok, satu-satunya sekutu Tiongkok ialah Pakistan. Korea Utara menyebabkan Tiongkok mengalami *security dilemma* yaitu dibangunnya THAAD di Korea Selatan dan dipasangnya radar X-band di pangkalan udara Jepang.

Kesimpulan

Proliferasi nuklir Korea Utara memberikan dampak buruk terhadap hubungan bilateralnya dengan Tiongkok. *Blood Alliance* antara Korea Utara dengan Tiongkok tidak lagi terlihat pasca uji coba nuklir Korea Utara yang ketiga tahun 2013. Tiongkok tidak lagi memberikan dukungan diplomatik kepada Korea Utara pada Resolusi 2094 yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB akibat uji coba nuklir Korea Utara yang ketiga. Perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok menandakan adanya degradasi hubungan bilateral antara Tiongkok dan Korea Utara. Perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap nuklir Korea Utara dipengaruhi oleh status Tiongkok sebagai sekutu terdekat Korea Utara yang dinilai memiliki pengaruh unik terhadap rezim Korea Utara. Negara-

negara superpower seperti Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan menyerukan denuklirisasi Korea Utara kepada Tiongkok.

Seruan Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan dalam yang terwujud dengan dibangunnya THAAD di Korea Selatan dan pembaruan perjanjian keamanan dengan Jepang membawa ancaman terhadap keamanan nasional Tiongkok. Pemimpin Tiongkok menilai seruan ketiga negara merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Tiongkok sehingga Tiongkok perlu memutuskan kebijakan luar negeri yang baru terkait nuklir Korea Utara. Kebijakan tersebut diputuskan Xi Jinping dengan mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan kondisi masyarakat Tiongkok. Kekuatan ekonomi Tiongkok memiliki arti penting bagi Tiongkok mengingat kekuatan ekonomi merupakan instrument diplomasi utama bagi Tiongkok. Kekuatan ekonomi Tiongkok bergantung pada negara partner dagang terbesar Tiongkok yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Sedangkan kondisi masyarakat Tiongkok juga tidak lagi pro terhadap Korea Utara terutama dari golongan intelektual dan militer. Atas dasar pertimbangan kekuatan ekonomi Tiongkok yang bergantung pada negara partner dagang terbesar dan kondisi masyarakat Tiongkok yang kini kontra terhadap *blood alliance* maka Xi Jinping memutuskan kebijakan luar negeri terkait nuklir Korea Utara tahun 2013 yang berbeda dengan kebijakan luar negeri terkait nuklir Korea Utara tahun 2006 dan 2009.

Referensi

- BBC. 2015. "How Potent are North Korea's Threats ?", <http://www.bbc.com/news/world-asia-21710644>, diakses pada 16 november 2015.
- BBC. 2015. "How Potent are North Korea's Threats ?", http://ichef.bbci.co.uk/news/660/media/images/59119000/jpg/_59119706_north_korea_ranges_2.jpg diakses pada 30 november 2015.
- Beina Xu and Jayshree Bajoria, 2006. "The China-North Korea Relations", <http://www.cfr.org/china/china-north-korea-relationship/p11097> , diakses pada 11 oktober 2015.
- Boao Forum. 2015. "Full Text of Chinese President Speech at Boao Forum for Asia Annual Conference", <http://english.boaoforum.org/hynew/19353.jhtml>, diakses pada 26 April 2017.
- Choi, Jong Kun dan Jong-Yun Bae. 2016. "Security Implications of a Nuclear North Korea : Crisis Stability and Imperatives for Engagement", *Korean Observer : Institute of Korean Studies*, Vol 47. No. 4, pp. 5-6.
- Davenport, Kelsey. 2016. "Chronology of U.S. – North Korean Nuclear and Missile Diplomacy," <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>, diakses pada 21 Mei 2016.
- Elman, Collin. 2007. "Realism", dalam Martin Griffiths (ed). *International Relations Theory for the Twenty-Firs Century – An introduction : Realism*. London and New York : Routledge
- Global Trade Atlas. 2014. "Where Does China Export To ?", http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/show/all/2014/ diakses pada 2 Maret 2017.
- Global Trade Atlas. 2015. "Where Does China Export To ?", http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/show/all/2015/ diakses pada 2 Maret 2017.
- Global Trade Atlas. 2012. "Where Does China Import From ?", http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/chn/show/all/2012/ diakses pada 2 Maret 2017.

- Global Trade Atlas. 2013. "Where Does China Export To ?", http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/show/all/2013/ diakses pada 2 Maret 2017.
- Global Trade Atlas. 2014. "Where Does China Export To ?", http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/show/all/2014/ diakses pada 2 Maret 2017.
- Global Trade Atlas. 2015. "Where Does China Export To ?", http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/show/all/2015/ diakses pada 2 Maret 2017.
- Hongguang, Wang. 2014. "North Korean missile recklessness deserves firm response from China", http://www.globaltimes.cn/content/847705.shtml?utm_content diakses pada 12 Juni 2017.
- Huang, Yufan. 2016. "Q and A : Yan Xuetong Urges China to Adopt a More Assertive Foreign Policy", <https://www.nytimes.com/2016/02/10/world/asia/china-foreign-policy-yan-xuetong.html>, diakses pada 22 April 2017.
- Jackson, Robert and Georg Sorensen. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terj. Dadan Suryadipura. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Justyna Szczudlik. 2015. "Toward's China's Great Power Diplomacy under Xi Jinping", http://www.pism.pl/files/?id_plik=19622 diakses pada 23 April 2017.
- Kynge, James. 2006. *China Shakes the Worlds : The Rise of a Hungry Nation*, terj. M. Rudi Atmoko. Jakarta : PT. Mizan Pustaka.
- Liberthal, Kenneth. 2004. *Governing China : From Revolution to Reform, 2nd Edition*. New York; London : W. W. Norton.
- Lobell, S., Ripsman, N., dan Taliaferro J. (editor). 2009. *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 2013. "Xi Jinping : Let the Sense of Community of Common Destiny Take Deep Root in Neighbouring Countries", http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/activities_663312/t1093870.shtml, diakses pada 26 April 2017
- Sang-Hun, Choe. 2016. "South Korea and U.S Agree to Deploy Missile Defense System". <https://www.nytimes.com/2016/07/08/world/asia/south-korea-and-us-agree-to-deploy-missile-defense-system.html>, diakses pada 21 April 2017.
- World Bank. 2013. "China Overview", <http://www.worldbank.org/en/country/china/overview>, diakses pada 26 April 2017.
- World Economic Forum. 2015. "A brief History of China's Economic Growth", <https://www.weforum.org/agenda/2015/07/brief-history-of-china-economic-growth/>, diakses pada 26 April 2017.
- Xuequan, Mu. 2013. "Xi Jinping: China to Further Friendly Relations with Neighboring Countries", http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-10/26/c_125601680.htm, diakses pada 23 April 2017.